

**Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan  
Otonomi Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2017**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**Aprilia Ayomi**

**12150089**

**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Sebagian Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

**Disusun Oleh :**

**Aprilia Ayomi**

**12150089**

**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**Lembar Pengesahan**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG  
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW UTARA TAHUN 2013-2017**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**APRILIA AYOMI**

12150089

**Dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Bisnis**

**Universitas Kristen Duta Wacana**

dan dinyatakan **DITERIMA** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi pada tanggal 18 Juni 2019

**Dosen Penguji :**

1. **Drs. Marbudy Tyas Widodo, MM., Ak., CA.**  
(Dosen Pembimbing/Ketua Tim)
2. **Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si., Ak., CA.**  
(Dosen Penguji)
3. **Maharani Dhian Kusumawati, SE., M.Sc., Ak., CA.**  
(Dosen Penguji)

**Tanda Tangan**

  
:  
  
:  
  
:

Yogyakarta 25 JUN 2019

**Disahkan Oleh :**

  
**Dekan Fakultas Bisnis**  
**Dr. Singgih Santoso, MM**

**Ketua Program Studi Akuntansi**  
  
**Dra. Putriana Kristanti, MM., Akt., CA**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

**Analisis Kinerja Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi**

**Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2017**

Skripsi yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana dalam Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar sarjana saya.

Yogyakarta, 13 Mei 2019

  
6000  
Aprilia Ayomi (12150089)

## MOTTO

- **Ulangan 31:8**

Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.

- **Mama**

Tidak ada warisan berharga yang dapat diberikan orangtua kepada anak selain ilmu dan pendidikan untuk menghadapi dunia kerja dan tidak akan mudah dibodohi oleh orang lain.

- **Albert Estein**

Hidup itu seperti naik sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.

- **Antonius Tangketasik**

Segala sesuatu adalah mungkin. Tidak mungkin adalah kemungkinan yang terakhir.

- **Michael Jordan**

Saya dapat menerima kegagalan, semua orang pasti pernah gagal dalam hidup mereka. Tapi saya tidak bisa menerima kegagalan karena tidak mencoba.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai saya selama menempuh pendidikan di kota Yogyakarta.
2. Terima kasih kepada Bapak Drs. Marbudyo Tyas Widodo,MM,Ak.CA. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memotivasi saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
3. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Binis Universitas Kristen Duta Wacana atas ilmu yang telah saya terima selama menempuh pendidikan di kampus serta dukungan moral yang begitu baik kepada saya dalam menyelesaikan kuliah saya.
4. Terima kasih kepada Papa, Mama, Ade Lio, Ciel dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung, menolong serta memotivasi saya setiap saat.
5. Terima kasih kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Bolmut yang telah membantu saya dalam melengkapi skripsi saya.
6. Terima kasih kepada sahabat sekaligus keluarga saya selama di kota Yogyakarta yaitu Bunda Tari, Ayah Vincent, Tipen, Derry, Imah, Jania, Dita, Mega, Vian, Agung, Ida dan Kak Cherry.
7. Terima kasih kepada keluarga saya dari zaman SMA yaitu Canta, Atha, Momon dan Eby yang selalu memotivasi saya disaat saya kelelahan.
8. Terima kasih kepada keluarga angkat saya yaitu Ayu dan Demar yang selalu ada buat saya kapanpun itu saya butuh mereka.
9. Terima kasih kepada keluarga rohani saya yaitu Mami Delina, team besar BV GBI Keluarga Allah, Kak Fena, Kak Fosa, Kak Sion, dan Kakak Ingrid.
10. Terima kasih kepada keluarga besar Akuntansi 2015.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan kasih karunia dan rahmatNya sehingga penelitian skripsi berjudul **Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otoda di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.**

Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata 1 pada program Sarjana Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana. Selain itu penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, sehingga bermanfaat bagi pembaca serta mahasiswa yang lainnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati.

Yogyakarta, 13 Mei 2019

Aprilia Ayomi

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iv
Motto.....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
Abstraksi .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Batasan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
2.1 Landasan Teori .....	6
2.1.1 Kinerja Keuangan .....	6
2.1.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	8
2.1.3 Analisis Laporan Keuangan.....	11
2.1.4 Analisis Rasio-rasio Keuangan.....	12
2.2 Jenis Rasio-rasio Keuangan Daerah .....	12
2.2.1 Derajat Desentralisasi .....	12
2.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	13
2.2.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah .....	15
2.2.4 Rasio Efektivitas PAD.....	16
2.2.5 Rasio Keserasian .....	17
2.2.6 Rasio Pertumbuhan.....	18
2.3 Penelitian Terdahulu.....	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Deskripsi Daerah.....	23
3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	23
3.1.2 Landasan Hukum, Visi dan Misi.....	24
3.1.2 Organisasi Perangkat Daerah.....	28
3.2 Metode Penelitian.....	28
3.2.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2.2 Tempat dan waktu Penelitian.....	28
3.2.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	28
3.2.4 Sumber Data.....	29
3.2.5 Kerangka Pemikiran.....	29
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4 Analisis Penelitian.....	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Derajat Desentralisasi.....	33
4.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	34
4.1.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	35
4.1.4 Rasio Efektivitas PAD.....	36
4.1.5 Rasio Keserasian.....	38
4.1.6 Rasio Pertumbuhan.....	40
4.2 Pembahasan.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	48

## DAFTAR TABEL

1. 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
2. 2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
3. 4.1 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi BPKD Kabupaten Bolmut Tahun Anggaran 2013-2017
4. 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian BPKD Kabupaten Bolmut Tahun Anggaran 2013-2017
5. 4.3 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan BPKD Kabupaten Bolmut Tahun Anggaran 2013-2014
6. 4.4 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD BPKD Kabupaten Bolmut Tahun Anggaran 2013-2014
7. 4.5(1) Perhitungan Rasio Kecerassian Belanja Operasi BPKD Kabupaten Bolmut Tahun Anggaran 2013-2014
8. 4.5(2) Perhitungan Rasio Kecerassian Belanja Modal BPKD Kabupaten Bolmut Tahun Anggaran 2013-2014
9. 4.6(1) Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan BPKD Kabupaten Bolmut Tahun Anggaran 2013-2014
10. 4.6(2) Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja BPKD Kabupaten Bolmut Tahun Anggaran 2013-2014
11. 4.3 Hasil Penelitian

## DAFTAR GAMBAR

1. 3.1 Peta Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

©UKDOW

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Penelitian
2. Surat Persetujuan Penelitian
3. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012-2013
4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013-2014
5. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014-2015
6. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2016
7. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2017
8. Kartu Konsul

©UKDW

## ABSTRAKSI

Pengukuran kinerja keuangan suatu daerah didasarkan pada kemajuan daerah tersebut dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang dapat membantu serta mendukung kemajuan negara. Dalam mengukur dan menentukan kinerja keuangan daerah inilah dibutuhkan laporan keuangan dari daerah tersebut. Laporan keuangan yang akan dianalisis dan diukur dapat memberi jawaban pasti tentang kinerja keuangan daerah tersebut serta memberi pengukuran seberapa mampu daerah tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah. Alat ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah pengukuran rasio. Rasio yang digunakan yaitu *Derajat Desentralisasi*, *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*, *Rasio Efisiensi Keuangan Daerah*, *Rasio Efektivitas PAD*, *Rasio Kekeragaman* dan *Rasio Pertumbuhan*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan seberapa besar kemajuan daerah tersebut dalam waktu lima tahun.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *Derajat Desentralisasi* daerah masih rendah tapi kemajuan dari setiap *Rasio* selama lima tahun terakhir menunjukkan rata-rata kenaikan yang semakin baik. Dengan hasil ini kinerja keuangan daerah masih bergantung penuh pada dana pusat yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Kata Kunci : *Derajat Desentralisasi*, *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*, *Rasio Efisiensi Keuangan Daerah*, *Rasio Efektivitas PAD*, *Rasio Kekeragaman*, *Rasio Pertumbuhan*, Kinerja Keuangan

## ABSTRACT

*Measurement of financial performance of a region is based on the progress of the region in supporting the implementation of regional autonomy that can help and support the progress of the country. In measuring and determining the financial performance of this area, financial reports from the area are needed. The financial statements that will be analyzed and measured can provide definite answers about the financial performance of the area and provide a measure of how capable the area is in implementing regional autonomy. The measuring instrument used in measuring regional financial performance is ratio measurement. The ratio used is the Degree of Decentralization, Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Harmony Ratio and Growth Ratio.*

*The purpose of this study was to analyze the financial performance of the North Bolaang Mongondow Regency in supporting the implementation of regional autonomy and how much the area progressed within five years.*

*From the results of the analysis that has been carried out shows that the degree of regional decentralization is still low but the progress of each ratio over the past five years shows that the average increase is getting better. With this result, regional financial performance is still fully dependent on central funds provided by the central government.*

*Keywords: Degree of Decentralization, Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio, Financial Performance*

## ABSTRAKSI

Pengukuran kinerja keuangan suatu daerah didasarkan pada kemajuan daerah tersebut dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang dapat membantu serta mendukung kemajuan negara. Dalam mengukur dan menentukan kinerja keuangan daerah inilah dibutuhkan laporan keuangan dari daerah tersebut. Laporan keuangan yang akan dianalisis dan diukur dapat memberi jawaban pasti tentang kinerja keuangan daerah tersebut serta memberi pengukuran seberapa mampu daerah tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah. Alat ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah pengukuran rasio. Rasio yang digunakan yaitu *Derajat Desentralisasi*, *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*, *Rasio Efisiensi Keuangan Daerah*, *Rasio Efektivitas PAD*, *Rasio Keserasian* dan *Rasio Pertumbuhan*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan seberapa besar kemajuan daerah tersebut dalam waktu lima tahun.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *Derajat Desentralisasi* daerah masih rendah tapi kemajuan dari setiap *Rasio* selama lima tahun terakhir menunjukkan rata-rata kenaikan yang semakin baik. Dengan hasil ini kinerja keuangan daerah masih bergantung penuh pada dana pusat yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Kata Kunci : *Derajat Desentralisasi*, *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*, *Rasio Efisiensi Keuangan Daerah*, *Rasio Efektivitas PAD*, *Rasio Keserasian*, *Rasio Pertumbuhan*, Kinerja Keuangan

## ABSTRACT

*Measurement of financial performance of a region is based on the progress of the region in supporting the implementation of regional autonomy that can help and support the progress of the country. In measuring and determining the financial performance of this area, financial reports from the area are needed. The financial statements that will be analyzed and measured can provide definite answers about the financial performance of the area and provide a measure of how capable the area is in implementing regional autonomy. The measuring instrument used in measuring regional financial performance is ratio measurement. The ratio used is the Degree of Decentralization, Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Harmony Ratio and Growth Ratio.*

*The purpose of this study was to analyze the financial performance of the North Bolaang Mongondow Regency in supporting the implementation of regional autonomy and how much the area progressed within five years.*

*From the results of the analysis that has been carried out shows that the degree of regional decentralization is still low but the progress of each ratio over the past five years shows that the average increase is getting better. With this result, regional financial performance is still fully dependent on central funds provided by the central government.*

*Keywords: Degree of Decentralization, Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio, Financial Performance*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan No. 33 Tahun 2004. Tujuan dari otonomi daerah adalah pemerataan daerah, meningkatkan peran serta masyarakat, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

(a) Desentralisasi, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi. (b) Dekonsentrasi, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. (c) Tugas Pembantu, tugas ini adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus segala kepentingan daerah masing-masing, Pemerintah Daerah dituntut meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari perangkat daerah tersebut. Dengan demikian diperlukan pengukuran kinerja terhadap pemerintah daerah.

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dari uang dan barang yang bisa dijadikan kekayaan daerah selama belum dikuasai oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari situlah dapat diukur kinerja keuangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Pemerintah daerah wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban daerahnya untuk dilihat dan dinilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik atau tidak.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi daerah otonom antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer, (3) Inefisiensi

pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Berdasarkan kategori penganggaran, laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Laporan pelaksanaan anggaran, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan pelaksanaan anggaran. Laporan pelaksanaan anggaran meliputi:
  - a. Laporan realisasi anggaran (LRA)
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL)
2. Laporan finansial, yaitu laporan yang bukan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Laporan finansial meliputi:
  - a. Laporan operasional (LO)
  - b. Neraca
  - c. Laporan arus kas (LAK)
3. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Berdasarkan kategori sumber pencatatan, laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Laporan keuangan primer, yaitu laporan keuangan yang pertama menampung pencatatan. Laporan keuangan primer meliputi:
  - a. Laporan realisasi anggaran (LRA)
  - b. Laporan operasional
  - c. Neraca
2. Laporan keuangan sekunder, yaitu laporan keuangan lanjutan dari laporan keuangan primer. Laporan keuangan sekunder meliputi:
  - a. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL)
  - b. Laporan perubahan ekuitas (LPE)
  - c. Laporan arus kas (LAK)

3. Laporan keuangan tersier, yaitu laporan keuangan pelengkap informasi pada laporan keuangan primer dan sekunder. Laporan keuangan tersier adalah catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Dari laporan keuangan pemerintah daerah, peneliti dapat meneliti kinerja keuangan daerah tersebut dengan menggunakan alat ukur rasio. Analisis Kinerja Keuangan Daerah yang akan digunakan oleh penulis adalah Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran serta berguna dalam pengambilan keputusan.

Menurut Faud (2016:137) Rasio Keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013-2017, dengan menggunakan alat ukur analisis rasio keuangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2013-2017.

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan dengan mengacu pada laporan realisasi anggaran pendapatan, dan belanja daerah yang diteliti. Penelitian ini mengacu pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga kesimpulan dari penelitian ini hanya berlaku untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2013-2017.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Universitas hasil penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan Universitas Kristen Duta Wacana.
- b. Bagi Pemerintah penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan, dan strategi untuk perbaikan kinerja keuangan daerah.
- c. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai kinerja keuangan daerah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis data yang telah dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Derajat desentralisasi pemerintah daerah Kabupaten Bolmut tahun 2013-2017 hasil masih rendah.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013-2017 menunjukkan hasil kemandirian yang sangat rendah dengan pola hubungan Instruktif.
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013-2017 menunjukkan hasil yang efisien.
4. Rasio Efektivitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013-2017 menunjukkan hasil yang sangat efektif.
5. Rasio Belanja Operasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa pengoptimalan dalam belanja operasi baik.
6. Rasio Belanja Modal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013-2017 menunjukkan hasil yang baik dalam mengoptimalkan belanja modal.
7. Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan lebih tinggi setiap tahunnya dan belanja daerah lebih rendah.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis untuk pemerintah daerah Kabupaten Bolmut adalah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, bisa menggunakan empat prinsip umum perpajakan; *efficiency*, *equity*, *neutrality* dan *administrative feasibility*. Dalam implementasinya, keempat prinsip ini juga perlu dilakukan secara berimbang sehingga tidak memunculkan konflik kepentingan baru dalam pembuatan peraturan daerah yang mengatur tentang sumber-sumber pendapatan penghasilan daerah.

Yang terpenting, dalam usaha memaksimalkan pendapatan asli daerah adalah melihat dengan cermat, sektor-sektor mana saja yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sementara untuk daerah otonom yang tidak bisa lagi meningkatkan sumber pendapatan daerahnya, dan hanya mengandalkan uluran dana dari pemerintah pusat, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan amalgamasi pada pemerintah daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, H. (2013, Mei 3). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)*. Yogyakarta, Indonesia.
- Agustina, F. (2007). *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Agustina, O. (2013). *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)*. Malang: Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Malang.
- Assidiqi. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dora, J. (2017, Juli 12). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014*. Yogyakarta, Indonesia.
- Faud, M. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*. Yogyakarta: CAPS.
- Jusmawati. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin.
- KS, L. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
- Latuny. (2016, Mei). *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Maluku Tenggara Barat)*. Jurnal Ekonomi, X, 3.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

- Mahsun. (2014). *Pengukuran Kinerja Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mongondow, B. P. (Ed.). (2017). *Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka*. Boroko: BPS Bolaang Mongondow.
- Pramita, P. R. (2015, April 28). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kabumen Tahun 2009-2013*. Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.
- Puspita, Yunita dan Junaidi. (2017). *Analisis Efektivitas Pajak Daerah Atas Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang*. Riset Akuntansi, 6, 06.
- Putra, W. (Ed.). (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Rajarafindo Persada.
- Rempowatu, J. (2016). *Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011-2014*. Jurnal EMBA, 4(1), 982-989.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Aktual)-Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Soleh, M. Z. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur*. Ekombis Review, 187-195.

[http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=87412&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=87412&obyek_id=4)

<https://drive.google.com/file/d/15kxca2xfJxA1ZRh6xf4BYh5YDScBVgAY/view>

<file:///C:/Users/asus/Desktop/SKRIPSI%20&%20JURNAL/JURNAL02.pdf>

<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=opac&sub=Opac&act=view&typ=html&self=1&op=opac>